

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Arba, HM. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Dian Aries Mujiburohman. 2019. *Penegakan Hukum Penertiban & Pendayagunaan Tanah Terlantar*. Yogyakarta: STPN Press.
- Harsono, Budi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Iman, Sudiyat. 1982. *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kehakiman.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Nasir, Moh. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Nasution, S. 1995. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara
- Saleh, Mohammad. 2011. *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*. Yogyakarta: Graha Cendekia.
- Santoso, Urip. 2015. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sihombing, BF. 2018. *Sejarah Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. 1998. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suhariningsih. 2009. *Tanah Terlantar: Asas Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Supriyadi, Bambang Eko. *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Suteki dan Gilang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* Depok: Rajawali Pers.

Syamsudin, M. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Kencana

Utomo, Mujahir. 2016. *Ilmu Tanah dan Dasar-Dasar Pengelolaan*. Jakarta: Kencana.

Wiratama, I Gede. 2004. *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Witanto. 2011. *Hukum Acara Mediasi dalam Pekara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta.

JURNAL

Anggraini, Jum. 2012. *Penerapan Asas Nasionalitas dalam Perundang-Undangan Agraria Indonesia (Studi Kasus Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996)*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12, No. 1.

Limbong, Dayat. 2017. *Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Penertibannya*. Jurnal Mercatoria. Vol. 10. No. 1.

Mahruf. 2017. *Analisis Hapusnya HGU Berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Tanah Terlantar Dari BPN: Studi Kasus Atas Putusan Nomor: 25/G/2013/PTUN.JKT*. Jurnal Ilmu dan Budaya. Vol. 40. No.55.

Niravita, Aprilia dan Wahanisa, Rofi. 2015. *Tipologi Sengketa Tanah Dan Pilihan Penyelesaiannya (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang)*. Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER. Vol. 1. No. 2.

Rejekiingsih, Triana. 2016. *Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia)*. Jurnal Yustisia. Vol. 5. No. 2.

Suhaimi, dkk. 2017. *Penertiban Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Terindikasi Terlantar Di Kota Banda Aceh*. Syiah Kuala Law Jurnal. Vol. 1. No. 1.

Ulya, Zaki. 2016. *Espaktasi Pengelolaan Tanah Terlantar Oleh Baitul Mal Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Tahun ke-46. No. 4.

SKRIPSI

Mahwati, Tri. 2020. *“Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga”*. Undergraduate (S1) Thesis, Universitas Negri Semarang.

Abdiansyah, Rachmat. 2015. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Objek Tanah Terlantar Atas Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan di Kabupaten Gowa”*. Undergraduate (S1) Thesis, Universitas Hasanuddin Makassar.

LAPORAN PENELITIAN

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, Data Tekstual Tanah Terindikasi Terlantar Pemuktahiran Tahun 2016.

Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, *Tindak Lanjut Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar Hak Guna Bangunan atas nama PT. Tanah Mas Duaja Nomor 1224/500/33/V/2017 tanggal 31 mei 2017 perihal Permohonan Pencabutan Penetapan Tanah Terlantar. PT. Tanah Mas Duaja*, Laporan Penelitian (Jakarta, 2017).

———, *Tindak Lanjut Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar atas nama PT. Bukit Semarang Jaya Metro menindaklanjuti Surat nomor 757.2/16-33.500/2016 perihal permohonan untuk dapat memanfaatkan dan melakukan perbuatan Hukum terhadap Hak Guna Bangunan atas nama PT. Bukit Semarang Jaya Metro dan Hasil Ekspose Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar*, Laporan Penelitian (Jakarta, 2017).

———, *Tindak Lanjut Permohonan PT. Karyadeka Alam Lestari Nomor MP.03.03/69-33/IV/2019 perihal permohonan penghapusan tanah terindikasi terlantar atas nama PT. Karyadeka Alam Lestari*, Laporan Penelitian, (Jakarta, 2019)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Ki Mangunsarkoro No. 23 Telepon: (024) 8316594 email: kot-semarang@atrbtn.go.id

Nomor : UP.02.03/1244-33.74.100/II/2023 Semarang, 27 Februari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
di Tempat

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro Nomor : 464/UN7.F1/AK/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 perihal
Permohonan Ijin Pengambilan Data/Informasi, atas nama :

Nama : Intan Rahmanindita Syepti
NIM : 11000119120013
Topik Penelitian : Proses inventarisasi tanah terindikasi terlantar dan upaya
para pemegang hak terhadap tanah terindikasi terlantar di
Kantor Pertanahan Kota Semarang

Bahwa kami menerima permohonan yang dimaksud pada periode 27
Februari 2023 s.d 10 Maret 2023 dan pelaksanaannya menyesuaikan dengan jadwal
Pejabat Kantor Pertanahan Kota Semarang yang ditunjuk terkait dalam topik
penelitian.

Demikian kami sampaikan dan terimakasih.

a.n. Kepala Kantor Pertanahan
Kota Semarang
Kepala Subbagian Tata Usaha,

Ditandatangani Secara
Elektronik

Umi Haniyati, S.E., M.Si.
NIP 197211241997032001

Tembusan:

Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, di Semarang.



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya